

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada triwulan I 2026, Provinsi Jawa Barat mengalami inflasi sebesar 0,52% (mtm), lebih tinggi dibanding inflasi nasional. Berdasarkan hal tersebut maka secara tahunan inflasi Jawa Barat menjadi 3,60% (yoy). Inflasi Jawa Barat pada bulan Maret 2025 terutama bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,38%. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi (mtm) yaitu daging ayam ras sebesar 0,06%, beras sebesar 0,05% serta minyak goreng sebesar 0,03%. **Di sisi lain, kelompok transportasi juga tercatat memberikan andil inflasi sebesar 0,09% (mtm)** dengan komoditas andil inflasi yaitu bensin dengan andil sebesar 0,05% dan angkutan antar kota sebesar 0,04%.

Secara spasial, seluruh Kab/Kota pantauan IHK di Jawa Barat mengalami inflasi (yoy). Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Majalengka sebesar 4,50% dengan IHK dengan IHK sebesar 111,81 dan inflasi terendah terjadi di Kabupaten Subang sebesar 3,32% dengan IHK sebesar 112,87. Di sisi lain, apabila dilihat secara mtm, inflasi tertinggi terjadi di Kota Cirebon sebesar 0,68% dan inflasi terendah terjadi di Kota Bekasi sebesar 0,39%.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Sebagai upaya pengendalian inflasi di daerah, TPID Provinsi Jawa Barat memiliki program kerja strategis berdasarkan *roadmap* pengendalian inflasi di daerah. Adapun permasalahan yang dihadapi terkait fluktuasi harga yang terjadi selama triwulan-I 2026 yaitu:

1. Sejumlah harga bahan pokok mengalami kenaikan saat memasuki bulan Ramadan hingga menjelang hari raya Idul Fitri. Kenaikan harga terjadi pada komoditas cabai, daging ayam, telur ayam, daging sapi, dan beberapa jenis sayuran;
2. Harga Cabai rawit mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan karena banyaknya gagal panen di daerah produsen akibat cuaca ekstrem
3. Tarif angkutan antar kota mengalami kenaikan seiring dengan peningkatan jumlah penumpang angkutan mudik lebaran;
4. Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamina Series dan Dex Series per 1 Maret 2026.
5. Harga emas di pasar global terus mengalami kenaikan hingga mencapai level tertinggi pada Januari 2026

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rangka menjaga laju inflasi agar selalu berada dalam *range* target yang telah ditetapkan, TPID Provinsi Jawa Barat telah menyelenggarakan beberapa kegiatan sebagai berikut yaitu sbb:

(K1) Keterjangkauan Harga

1. Survei Harga Pangan Strategis di Pasar 27 Kabupaten/Kota yang dilaksanakan setiap bulan;

Pelaksanaan OPADI Idul Fitri pada 10 - 16 Maret 2026 di 27 Kabupaten/Kota;

- 2.
3. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah sampai dengan Maret 2026 sebanyak 311 kali;
4. Mobil Pangan Keliling Jawa Barat (Mobil Paling Jawara) sampai dengan Maret 2026 dilaksanakan sebanyak 9 kali;
5. Pasar Tani sampai dengan Maret 2026 sebanyak 7 kali;
6. Penyaluran beras SPHP hingga 31 Maret 2026 sebanyak 33.369.275 Kg;
7. Penyaluran bantuan pangan beras periode Februari – Maret 2026 sebanyak 121.870.600 Kg dan minyak goreng sebanyak 24.374.120 liter.

(K2) Ketersediaan Pasokan

1. Pengelolaan CPPD oleh BULOG per 27 Maret 2026, dengan rincian sebagai berikut: a. CPPD Provinsi sebesar 2.626,93 ton beras dan b. CPPD Kabupaten/Kota antara lain: Beras: 2.918,26 ton; Gabah: 36,16 ton; Minyak Goreng: 45,85 KL; Gula Pasir: 23,82 ton; Daging Sapi: 0,40 ton Telur ayam: 29,55 ton
2. Pengadaan beras hingga 31 Maret 2026 sebanyak 218.296,82 ton setara beras;
3. Pengembangan Kawasan Sayuran dan Buah melalui fasilitasi sarana produksi berupa benih;
4. Pengendalian Hama Terpadu (PHT) untuk komoditas bawang merah dan aneka cabai;
5. Pengembangan komoditas tanaman cabai dan bawang merah melalui optimalisasi peran Petani Andalan dan Petani Champion;
6. Penguatan produksi perikanan tangkap dan budidaya;
7. Pendampingan pelaku usaha perikanan dan nelayan.

(K3) Kelancaran Distribusi

1. Fasilitasi Distribusi Pangan sebanyak 550.00 Kg;
2. Optimalisasi distribusi pangan di 129 Kios Pangan;
3. Pengamanan lalu lintas saat HBKN Ramadhan dan Idul Fitri, khususnya menjelang puncak arus mudik dan arus balik.

(K4) Komunikasi Efektif

1. Penyusunan Dokumen Kinerja Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025;
2. Rapat Koordinasi Dwimingguan Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat sebanyak 2 kali selama Triwulan I;
3. *Capacity Building* Persiapan Award Tahun 2026 dilaksanakan di Kabupaten Bogor pada 27 – 29 Januari 2026;
4. High Level Meeting menjelang HBKN Ramadhan dan Idul Fitri dilaksanakan pada 5 Februari 2026 di Kab. Kuningan;
5. Rapat Koordinasi Dalam Rangka Menjaga Stok Pangan dan Stabilisasi Harga Menjelang HBKN dilaksanakan pada 10 Februari 2026 dan 13 Februari 2026;
6. Rapat Koordinasi Kegiatan Pasar Murah Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah Menjelang HBKN Idul Fitri dilaksanakan pada 20 Februari 2026;
7. Penguatan Sinergi Kebijakan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Inflasi melalui Forum Sekretariat Daerah dilaksanakan pada 25 Februari 2026;
8. Rapat Koordinasi Kesiapan Pasokan BBM dan LPG Menjelang HBKN Idul Fitri dilaksanakan pada 5 Maret 2026;
9. Diskusi Penyaluran Beras SPHP dan Bantuan Pangan pada 10 Maret 2026;
10. *Focus Group Discussion* terkait Dampak Perang Iran-AS Israel terhadap Perekonomian dan Ketahanan Fiskal Daerah dilaksanakan pada 31 Maret 2026;

Pendampingan kepada Kabupaten/Kota;

- 11.
 12. Pertemuan Penyampaian Laporan Perkembangan Harga Komoditas Pangan Strategis serta Upaya Pengendalian Inflasi oleh Tim Teknis Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah Jawa Barat (SILINDA JABAR) sebanyak 3 kali selama Triwulan I;
 13. Pengembangan Aplikasi SILINDA JABAR.
4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Beberapa kegiatan pengendalian inflasi yang telah dilakukan oleh TPID Jawa Barat secara umum berdampak dalam menekan laju inflasi. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang masih perlu menjadi perhatian dalam pengendalian inflasi ke depannya seperti:

1. Harga emas perhiasan dipengaruhi oleh harga emas dunia;
 2. Eskalasi konflik di Timur Tengah memengaruhi kelancaran arus rantai pasok barang, sehingga meningkatkan harga barang impor seperti gula, bawang putih, gandum, dan kedelai;
 3. Volatilitas harga pangan masih tinggi pada komoditas seperti cabai, ayam, telur, dan beras sehingga berpotensi memicu inflasi lanjutan;
 4. Faktor cuaca dan perubahan iklim masih memengaruhi produksi pangan sehingga berisiko mengganggu stabilitas pasokan dan harga;
 5. Rantai distribusi yang panjang dan belum efisien menyebabkan disparitas harga antara produsen dan konsumen tetap tinggi;
 6. Ketergantungan pasokan dari luar daerah membuat beberapa wilayah di Jawa Barat rentan terhadap gangguan pasokan dan kenaikan harga;
 7. Tekanan permintaan pasca HBKN masih terjadi pada beberapa komoditas sehingga menjaga harga tetap tinggi meskipun periode Lebaran telah berlalu;
 8. Potensi gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem dan kendala infrastruktur masih menjadi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan;
 9. Peningkatan permintaan akibat program MBG turut memberikan tekanan tambahan terhadap harga;
 10. Ekspektasi inflasi masyarakat pasca HBKN masih perlu dikelola untuk mencegah spekulasi harga dan *panic buying* lanjutan;
 11. Perbedaan karakteristik inflasi antar daerah menuntut penguatan sinergi dan intervensi kebijakan yang lebih spesifik berbasis wilayah.
5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Langkah kebijakan yang diambil oleh TPID Provinsi Jawa Barat dalam pengendalian inflasi selama periode Triwulan-I 2026 di antaranya :

1. Sidak pemantauan harga dan pasokan ke pasar maupun distributor untuk memastikan harga sesuai dengan harga acuan yang telah ditentukan;
2. Optimalisasi Operasi Pasar dan GPM 3T (tepat lokasi, tepat komoditas, dan tepat waktu) berbasis data real time;
3. Monitoring dan evaluasi efektivitas OP dan GPM sehingga diperlukan pencatatan dan administrasi data pelaksanaan waktu, tempat, dan komoditas pada OP dan GPM;
4. Peningkatan produktivitas komoditas pangan melalui intensifikasi/ekstensifikasi lahan dan pemanfaatan teknologi;
5. Pengalokasian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD);
6. Optimalisasi Kios Pengendalian Inflasi Pangan;

Mendorong realisasi transaksi Kerjasama Antar Daerah (KAD) eksisting atau yang telah

7. terjalin, sehingga mampu menjaga ketersediaan pasokan;
8. Memastikan kelancaran distribusi bapokting ke seluruh pasar baik tradisional maupun ritel modern;
9. Pengaturan lalu lintas pangan saat momentum HBKN Ramadan dan Idulfitri, agar tidak terjadi keterlambatan distribusi pangan;
10. Memanfaatkan Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) yang telah disediakan baik oleh Bapanas atau Bank Indonesia;
11. Menggencarkan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) sebagai salah satu edukasi belanja bijak dan menjaga ekspektasi masyarakat terhadap inflasi;
12. Edukasi diversifikasi pangan kepada masyarakat.